



**BAB
III**

ANTISIPASI
LEDAKAN PENDUDUK





MEWASPADAI LEDAKAN PENDUDUK ABAD 21

Sensus Penduduk tahun 2000 dengan resmi dan tegas memberi kebanggaan tersendiri kepada pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa apabila kita bersatu, mau bekerja keras dan tidak henti-hentinya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapat kesempatan membangun keluarga yang sejahtera, lahir dan batin, bangsa ini mampu mengubah arah jarum jam dengan baik.

K eberhasilan program-program KB, kesehatan, pendidikan dan lainnya telah memberi kesempatan kepada keluarga Indonesia mengurangi jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sehingga setiap keluarga bisa lebih longgar merancang masa depannya. Melahirkan dengan lebih sejahtera sehingga setiap keluarga tidak harus kehilangan ibunya, atau kehilangan anak yang dirindukannya karena persiapan yang tidak matang dan kesehatan yang tidak memadai.

Selama tigapuluh tahun angka kematian ibu hamil dan melahirkan, biarpun masih tinggi, bahkan tertinggi di wilayah Asia, 300-an per 100.000 kelahiran, telah menurun lebih dari 50 persen dari keadaan tahun 1970-an



lebih dari 700 per 100.000 kelahiran. Angka kelahiran telah menurun secara drastis sehingga setiap ibu bisa mengembangkan kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya. Angka kematian bayi juga telah menurun dengan bermakna sehingga setiap keluarga tidak perlu menyediakan cadangan anak untuk mengharapkan anaknya jadi “*orang*” yang dapat dibanggakan di masa tua.

Akibatnya cukup positif, tetapi bisa juga sangat mengawatirkan. Keberhasilan selama tigapuluh tahun itu menggeser anak-anak dan remaja, berusia dibawah 15 tahun, yang biasanya menjadi dasar dari bagian bawah piramida penduduk Indonesia, ke bagian piramida dengan usia yang lebih tinggi, yaitu diatas 15 tahun. Bentuk piramida penduduk yang biasanya seperti candi Borobudur yang mempunyai landasan dasar yang lebar, berubah menjadi piramida penduduk yang mirip candi Prambanan, yang mempunyai bentuk yang langsing, landasan yang tidak terlampaui melebar tetapi tinggi menjulang panjang dan runcing keatas.

Pergeseran bagian dasar piramida itu dari segi positif telah kita bahas pada hari Sabtu yang lalu menghasilkan bonus demografi yang bisa sangat positif kalau munculnya penduduk usia dewasa tersebut bisa dikembangkan menjadi tenaga kerja yang bermutu, kreatif dan produktif. Bonus itu makin lama makin menguntungkan karena beban ketergantungan pada penduduk usia anak-anak dan usia tua selama duapuluh sampai tigapuluh tahun yang akan datang akan terus mengecil.

Syaratnya sederhana, program KB dan kesehatan yang selama ini ditangani dengan gegap gempita tetap mendapat perhatian dan dijalankan dengan memihak kepada keluarga kurang mampu, kesempatan yang luas untuk mengikuti gerakan KB secara mandiri bagi yang mampu, serta



pemberdayaan anak-anak, remaja dan penduduk usia kerja, terutama perempuan, agar mampu memberikan kontribusi kepada keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Bonus itu akan memberi arti paling ideal pada sekitar tahun 2020-2030, yaitu pada saat beban ketergantungan penduduk usia anak-anak dan usia tua diatas 60-65 tahun paling kecil, sehingga seluruh potensi penduduk usia kerja, usia 15-65 tahun, dapat memberikan sumbangan yang maksimal untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Para ahli Demografi tidak memberi label *beban ketergantungan* kepada penduduk usia kerja yang menganggur. Padahal ledakan penduduk usia kerja, usia 15-64 tahun, yang mulai nampak dengan jelas pada akhir tahun 2000 lalu, karena kenaikan sebesar lebih dari dua kali lipat atau lebih



dari 100 persen, dibandingkan dengan keadaan tahun 1970, tidak seluruhnya memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan bangsanya karena kualitasnya rendah dan menganggur.

Kualitas rendah itu juga mengawatirkan karena penduduk usia 15-30 tahun, sebagai tenaga kerja muda yang sedang mencari kerja, mulai meninggalkan pedesaan dan pekerjaan sebagai petani atau usaha mandiri berkaitan dengan pertanian di pedesaan, karena munculnya harapan dan iming-iming latar belakang pendidikan SD dan sedikit SMP yang dimilikinya. Lapangan kerja baru di daerah urban tidak menjanjikan, tetapi usaha mandiri di pedesaan belum juga mendapat perhatian yang memadai dan belum berkembang dengan baik.

Akibarnya *ledakan baru* penduduk usia kerja yang sebenarnya mulai harus memberi sumbangan pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat, bahkan memberi tambahan beban ekonomi yang tidak bakal lebih ringan dibandingkan dengan beban ketergantungan pada usia anak-anak dan usia tua yang pernah harus ditanggung oleh masyarakat di masa lalu.

Dukungan budaya yang tidak menguntungkan pada penduduk perempuan belum juga hilang sehingga bonus tambahan ledakan penduduk muda perempuan yang sebagian mulai mengenyam pendidikan tingkat SD dan sebagian SMP harus kembali ke dapur dan tidak dapat *mengenyam kemerdekaan baru* sebagai pekerja di luar rumah. Tenaga perempuan setengah terdidik ini tetap diperlakukan oleh keluarga dan masyarakat sebagai tenaga domestik dengan segala penderitaan yang harus ditanggung dengan *rasa gundah yang terasa lebih berat*.

Tanda-tanda yang mengerikan mulai nampak. Anak-anak gadis dari



pedesaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan sebayanya di tahun 1970-an, dan tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai, kembali menyelesaikan penderitaannya dengan segera menikah. Dari sekitar 9,9 juta perempuan remaja usia 20-30 tahun di daerah pedesaan, sekitar 7,8 juta telah menyelesaikan persoalan yang dialaminya dengan menikah pada usia muda.

Setelah itu mereka membuktikan “*kesetiaan kepada suami dan keluarganya*” dengan menghasilkan kehamilan pertama, kelahiran anak pertama, kehamilan kedua, beranak lagi, dan begitu seterusnya. Mirip seperti orang tua dan nenek moyang kita di masa lalu. Padahal tingkat kematian bayi dan tingkat kematian anak sudah sangat menurun.

Akibatnya jumlah penduduk yang dihasilkan oleh keluarga baru ini bisa lebih besar dibandingkan dengan keluarga orang tua dan nenek moyang kita. Di masa lalu anak-anak yang dilahirkan tidak jarang yang tidak sempat menikmati ulang tahun yang pertama, tidak langgeng karena meninggal dunia pada waktu dilahirkan atau meninggal dunia pada masa bayi dan kanak-kanak. Ledakan baru ini harus diwaspadai kalau kita tidak ingin terjebak pada masalah pelik yang lebih rumit dibandingkan dengan ledakan di masa lalu.

D



MEMBANGKITKAN KEMBALI KOMITMEN KEPENDUDUKAN

Dalam tahun 1950-an suatu organisasi yang sangat prihatin terhadap masalah kemanusiaan didirikan oleh para dokter dan aktifis kemanusiaan yang berbudi luhur. Organisasi itu kemudian bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Untuk mendapatkan simpati dan meningkatkan komitmen politik yang menjadi syarat utama suatu gerakan masyarakat, organisasi PKBI bergerak dengan strategi yang jitu secara pelahan dan meyakinkan.

Gerakan yang dilakukan dipilih berupa langkah nyata membantu ibu yang mengandung dan melahirkan, terutama yang mempunyai resiko tinggi. Para sesepuh dan penggerak yang bijaksana tidak mengundang kontroversi atau memecah perhatian, tetapi dengan telaten dan penuh kesabaran melakukan pendekatan ilmiah meyakinkan semua pihak. Mereka yang dianggap potensial diajak bekerja sama untuk menjadi sahabat dan mengundang simpatisan lainnya bersama-sama menyusun barisan sepaham yang sangat kuat.

Kegigihan para sesepuh itu menghasilkan suatu organisasi



kemasyarakatan yang sangat kuat dan profesional. Tenaga-tenaga dokter ahli, umumnya dokter ahli kandungan, yang kemudian diikuti oleh dokter-dokter muda, yang umumnya mempunyai hubungan kekerabatan profesional, antara guru besar dan bekas mahasiswa yang kemudian menjadi dokter spesialis, atau kemudian dokter umum lainnya, atau mereka yang tergerak hati nuraninya untuk usaha yang sangat luhur itu, bergabung dan menggalang kebersamaan yang kokoh.

Selama masa perkembangannya, para aktifis mencari dan mengajak anggota baru dari tokoh-tokoh pemerintahan untuk mendapatkan dukungan politik. Sementara itu dokter-dokter spesialis ahli kandungan memberikan petunjuk dan pelayanan profesional yang sangat intensif sehingga advokasi yang gencar selalu disertai dengan dukungan fakta yang sangat nyata di lapangan.

Namun demikian, dalam suasana pemerintahan yang sedang gencar-gencarnya menunjukkan kebesarannya dengan pamer jumlah penduduk yang besar sebagai andalan, gerakan para dokter yang bijaksana itu tidak mendapat tempat. Presiden RI sedang asyik dan “terpaksa” mempergunakan “manusia yang jumlahnya besar” sebagai kekuatan raksasa untuk menakut-nakuti negara yang dianggapnya sebagai musuh atau bisa menjadi ancaman.

Gertak itu secara politis masih bisa diterima karena di masa itu peperangan, lebih-lebih setelah perang dunia kedua, masih sangat tergantung otot, atau kekuatan jumlah manusia. Senjata modern masih bisa “dikalahkan” oleh kekuatan jumlah manusia yang besar.

Dalam suasana demikian, gerakan organisasi PKBI terpaksa berjalan lamban, terutama dalam menggerakkan komitmen politik, tetapi tetap teguh

dan sangat aktif dengan berbagai pelayanan kemanusiaan membantu ibu-ibu hamil dan beresiko tinggi untuk tidak meninggal dunia karena perdarahan pada waktu melahirkan.

Namun, karena jumlah dokter ahli kandungan atau jumlah bidan di seluruh Indonesia masih sangat terbatas, bagaimanapun gerakan pelayanan yang dapat diberikan sangat terbatas. Lebih-lebih lagi gerakan para dokter dan bidan yang sadar itu belum tentu diikuti oleh koleganya yang ada di kota lain atau lebih-lebih di kota kecil yang jauh dari pusat organisasi profesi yang diikutinya.

Karena pelayanan medis biasanya diikuti oleh para elite dan mereka yang mampu, organisasi PKBI dengan cekatan menempatkan para elite dan kelompok mampu menjadi pengurus dan penggerak yang dinamis. Dengan cara itu kemajuan segera dicapai karena PKBI mampu menggugah kesadaran para elite yang tersebar luas. Secara kebetulan, dengan adanya arus





perubahan politik di tahun 1965, gerakan ini mendapat dukungan momentum politik yang sangat menguntungkan. Tidak saja Presiden Soeharto menaruh perhatian terhadap rakyat kecil, tetapi di Jakarta ada seorang Gubernur yang dengan berani menangkap aspirasi dengan secara langsung melaksanakan percobaan program KB dalam lingkungan terbatas di Jakarta.

Kesempatan perubahan politik itu ditangkap oleh organisasi internasional yang memang sedang getol-getolnya mencari jalan memperluas kesadaran kependudukan secara global. Mereka melihat sosok pejabat presiden dan gubernur yang dinamis dan sangat peka terhadap kepentingan rakyat kecil itu dengan antusiasme yang tinggi. Setelah beberapa organisasi dunia secara berhasil mengadakan pertemuan internasional Asia Tenggara di Taiwan, beberapa organisasi itu juga siap membantu suatu pertemuan nasional di Jakarta.

Akhirnya, pada awal tahun 1967, dengan dukungan Pemerintah DKI Jakarta, dan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Pj Presiden Soeharto, PKBI dengan didukung berbagai organisasi kependudukan internasional menyelenggarakan suatu Konperensi Kependudukan yang pertama di Jakarta. Dalam pertemuan itulah Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dengan gegap gempita memberikan dukungan secara terbuka diadakannya suatu program KB di propinsi Jakarta.

Tidak kurang galaknya, pemerintah pusat mengirim Menko Kesranya, KH Idham Khalid, yang sekaligus Ketua Umum NU, memberikan juga dukungannya yang kuat. Tanda-tanda dukungan ini memberi angin segar kepada organisasi PKBI untuk tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat.

Segera cabang-cabang di seluruh Indonesia yang semula bergerak



dengan sangat hati-hati mendapat dorongan dan perlindungan yang sangat kuat untuk bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak jarang para Kepala Dinas Kesehatan di daerah langsung menjadi pengurus cabang PKBI dan bergerak secara luas membantu masyarakat di desa-desa dengan pelayanan secara cuma-cuma yang ternyata sangat ditunggu rakyat banyak.

Disamping memberikan dukungan terhadap Kongres Kependudukan dan KB di Jakarta, pada tahun yang sama, organisasi internasional yang sangat dinamis itu mendapat dukungan pula dari banyak negara anggota PBB untuk mengajak pemimpin negara-negara anggota PBB menanda tangani deklarasi kependudukan dunia.

Presiden Soeharto termasuk salah satu Kepala Negara yang segera ikut menanda tangani deklarasi Kependudukan Dunia itu pada tahun 1967. Dengan ditanda tangannya deklarasi Kependudukan Dunia dan Kongres yang berhasil itu, dalam waktu kurang dari tiga tahun gerakan KB di Indonesia telah menghasilkan komitmen politik yang sangat tinggi di kalangan pemerintah.

Pada tahun 1970-an pemerintah mulai mengambil alih tanggung jawab memperbaiki kualitas pelayanan untuk ibu hamil dan melahirkan itu dengan mengadakan program Nasional KB secara resmi. Untuk tidak berbuat gegabah, dan sambil mengembangkan dukungan masyarakat secara luas, program itu dimulai pada enam propinsi di Indonesia, yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Lembaga-lembaga Kependudukan Dunia, antara lain UNFPA PBB, Bank Dunia, US AID dan lembaga swasta lain dari Amerika, menyambut komitmen tersebut dengan antusias. Mereka terkejut dan sangat berharap



bahwa di negara yang masyarakatnya lebih dari 90 persen beragama Islam, ternyata bisa menerima program KB dan memberikan komitmennya yang sangat tinggi. UNFPA PBB dan Bank Dunia menawarkan bantuan untuk menggelar program yang lebih besar. Lembaga US AID siap pula membantu alat kontrasepsi berapa saja yang diminta Indonesia.

Janji bantuan lainnya tidak hanya dalam bentuk alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga untuk mengembangkan jaringan dan kantor-kantor di seluruh propinsi dan kabupaten. Tidak itu saja, lembaga-lembaga internasional tersebut juga siap membantu untuk seluruh propinsi dan seluruh kabupaten dan kota madya yang belum mempunyai program KB.

Untuk mengembangkan program di enam propinsi itu, setelah bereksperimen dengan berbagai bentuk organisasi dan kegiatan lainnya, akhirnya pada tahun 1972 pemerintah secara resmi membentuk organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang permanen.

Untuk segera bisa bekerja secara operasional diperlukan kantor-kantor cabang di semua propinsi, kabupaten dan kotamadya. Karena dipandang tidak mudah membentuk kantor cabang, maka pemerintah memutuskan untuk menitipkan kantor cabang itu untuk sementara pada dinas kesehatan di setiap propinsi, begitu juga di tingkat kabupaten dan kotamadya.

Titipan organisasi ini tidak berlangsung lama. Segera BKKBN mengembangkan kantor-kantor cabang di semua propinsi, kabupaten dan kotamadya. Program-program advokasi dilakukan dengan gencar disertai dengan pelayanan yang semula sangat lamban tetapi kemudian berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tahun pertama dengan operasi yang digelar melalui klinik-klinik KB dari jajaran rumah sakit dan klinik



Puskesmas Departemen Kesehatan menghasilkan sekitar 50.000 akseptor KB.

Sukses dengan 50.000 akseptor KB itu berbarengan waktunya dengan saat-saat akhir perundingan dengan PBB dan Bank Dunia tentang bantuan untuk KB di Indonesia. Mereka sangat bangga bahwa ternyata masyarakat yang semula dikira bakal sukar menerima KB karena alasan agama, bisa menerima dengan baik, biarpun baru 50.000 pasangan dan umumnya dengan usia yang sudah agak lanjut atau dengan jumlah anak yang sudah terlanjur banyak. Bagi banyak pihak di luar negeri, kenyataan penerimaan dengan sedikit sekali resistensi itu sudah memberi harapan yang sangat besar.

Perundingan yang sudah cukup matang segera diikuti dengan penanda tanganan MOU yang menjadi dasar dari suatu kerjasama internasional yang pertama tentang penanganan masalah kependudukan di Indonesia. Dengan dukungan internasional itu BKKBN segera mendapat kepercayaan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat luas. Kantor-kantor cabang yang semula “dititipkan pada Dinas Kesehatan” segera diganti dengan kantor baru dengan pegawai-pegawai yang diambil dari berbagai instansi lain yang disumbangkan pada pembentukan BKKBN baru tersebut.

Sambil menunggu menyatunya kultur baru lembaga yang sedang didirikan itu, Pimpinan BKKBN tidak tinggal diam. Upaya membangun kultur organisasi BKKBN yang baru dilakukan dengan mengembangkan program advokasi dan informasi yang kuat. Para petugas yang belum yakin benar apa tugas dan fungsinya tidak menunggu instruksi tetapi segera mengembangkan kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk dengan para alim ulama dan pimpinan serta tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah.



Untuk menyongsong program besar akibat adanya dana yang sangat besar dari Bank Dunia dan PBB tersebut, berbagai Tim internasional datang dan memberi petunjuk. Semangat nasional sempat terpecah karena tim PBB dan Bank Dunia mencoba mendekati program dan kegiatan yang harus dijalankan dengan cara rasional. Tim nasional, yang kemudian diperkuat dengan tenaga ahli yang memetik pendidikan di luar negeri muncul dengan garapan yang mengandalkan pendekatan kemasyarakatan yang kuat dengan memberikan peran yang sangat tinggi terhadap tokoh dan lembaga kemasyarakatan yang tersebar luas.

Akhirnya kedua pendekatan itu bisa disatukan karena ternyata pendekatan modern dengan dana yang melimpah terpaksa mundur pelaksanaannya karena urusan administrasi yang lamban, sementara masyarakat dengan pendekatan kemasyarakatan lari kencang bagaikan anak panah mencuat dari busurnya.

Keberhasilan ini kemudian didukung oleh pelembagaan yang makin kokoh di tingkat propinsi, kabupaten dan pedesaan. Hasilnya sungguh sangat mengagumkan. Partisipasi masyarakat naik dengan sangat menakjubkan. Jumlah akseptor melompat melebihi impian sebelumnya. Akibatnya fertilitas menurun tajam, angka kelahiran turun dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Pertumbuhan penduduk turun dengan meyakinkan.

Pada saat terjadi krisis ekonomi, yang kemudian berlanjut menjadi krisis multidemensi, perhatian terhadap masalah kependudukan dan KB juga mengendor. Pimpinan BKKBN serasa mendapat angin reformasi dan mencoba mengembangkan arah baru bagi upaya penanganan KB. Namun, perhatian terhadap penanganan masalah KB justru makin mengendor. Kepemimpinan dan kelembagaan KB Kependudukan malah ikut mengalami



krisis. Akibatnya perhatian dan komitmen terhadap penanganan masalah kependudukan menurun dengan tajam.

Pertanyaan timbul kembali, apakah Kongres PKBI minggu ini menjadi peristiwa ulangan dari Kongres Kependudukan tahun 1967, yaitu suatu harapan timbulnya tonggak baru untuk membangun citra, perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap penanganan masalah kependudukan. Mudah-mudahan sejarah berulang kembali.

D





KOMITMEN BARU UNTUK PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Untuk memperingati berdirinya suatu organisasi *Partners in Population and Development* yang dibentuk tahun 1994 diadakan pertemuan di Wuhan, Republik Rakyat Cina. Organisasi yang bergerak dalam bidang kependudukan dan mencoba membangun kerjasama yang erat antara negara-negara berkembang, negara-negara Non Blok, negara-negara Selatan Selatan dengan negara-negara maju. Pembentukan Organisasi ini disponsori oleh Indonesia, khususnya Presiden Soeharto, yang kebetulan pada waktu itu adalah Ketua Gerakan Non Blok, Mexico, Tunisia, Zimbabwe, Mesir, dan lembaga Internasional Rockefeller Foundation.

Pertemuan-pertemuan persiapan yang diadakan di Belagio, Itali, New York, Amerika Serikat, Bali dan Jakarta, Indonesia, menandai suatu proses panjang yang cukup sulit dalam pembentukannya. Salah satu kesulitan yang ada adalah kecurigaan negara maju bahwa organisasi kependudukan yang diprakarsai oleh negara berkembang tersebut dicurigai bisa menjadi pesaing dari organisasi dunia yang telah terbentuk dengan dominasi negara maju.



Berkat kegigihan beberapa negara berkembang yang mempunyai program kependudukan yang maju, akhirnya organisasi *Partners in Population and Development* itu berhasil di deklarasikan di Kairo, Mesir, bersamaan waktunya dengan Konperensi Kependudukan Dunia yang diikuti oleh 189 negara dari seluruh dunia.

Pada peringatan sepuluh tahun di Wuhan, RRC, tersebut, organisasi ini telah tumbuh subur dan dirasakan oleh negara-negara berkembang sebagai organisasi yang berguna dan memungkinkan pengembangan jalinan kerjasama antara negara-negara yang sedang tumbuh. Lebih-lebih lagi organisasi ini memberi semangat kepada negara-negara berkembang untuk terus memajukan sumber daya manusia dengan program-program reproduksi untuk generasi muda, peningkatan upaya penanggulangan serangan virus HIV/AIDS, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Disamping komitmen yang disegarkan di Wuhan tersebut, bulan lalu di New York, PBB menggelar sidang umum untuk memperingati sepuluh tahun Konperensi Kependudukan Kairo. Indonesia mengirim utusan khusus yang dipimpin oleh Kepala BKKBN dr. Sumaryati Aryoso, SKM. Pertemuan PBB itu didahului dengan penyerahan 30.000 tanda tangan pemimpin dunia yang meminta perhatian PBB dan dunia tentang masalah kependudukan yang tetap harus mendapat perhatian.

Komitmen dari 30.000 pemimpin dunia itu merupakan penyegaran terhadap keprihatinan yang tetap melanda dunia terhadap nasib dan masa depan anak cucu yang sekarang sedang tumbuh dalam suasana serangan virus HIV/AIDS, atau serangan terorisme, ketidak nyamanan fasilitas pendidikan yang tidak memadai, fasilitas kesehatan yang kurang, hutan yang habis digundul, maupun ancaman kekerasan dan bencana dunia lainnya.



Sidang yang secara khusus digelar tersebut karena tidak ada Konferensi serupa seperti halnya Konferensi Kependudukan yang biasanya diadakan sekali dalam sepuluh tahun, mendengarkan pidato-pidato dari pemimpin dunia yang intinya tetap menghendaki adanya perhatian yang tinggi terhadap penyelesaian masalah kependudukan yang masih tersisa. Mereka umumnya beranggapan bahwa program yang lebih terarah akan memudahkan tercapainya sasaran-sasaran yang telah disepakati dan dirumuskan dalam *Millenium Development Goals* oleh PBB pada tahun 1990 yang lalu.

Disamping adanya seruan yang lebih bersifat politis, dalam suasana keprihatinan karena mengalirnya dana untuk urusan kependudukan yang makin sulit, Sidang PBB tersebut ditandai pula dengan komitmen negara-negara Uni Eropa yang menyediakan bantuan untuk persediaan kontrasepsi melalui Badan Kependudukan Dunia UNFPA sebesar US\$ 75 juta. Dengan komitmen bantuan tersebut diharapkan penduduk miskin yang ber-KB di seluruh dunia dapat mencegah kematian ibu hamil dan melahirkan yang luar biasa.

Dengan adanya penyegaran komitmen dunia tersebut diharapkan pemerintah baru RI dibawah pimpinan Presiden Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang kebetulan Bapak beliau adalah bekas Kepala BKKBN Kabupaten di Pacitan, memberikan perhatian yang besar terhadap kelanjutan upaya pemberdayaan penduduk sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

D



GEBRAKAN SBY DALAM KEPENDUDUKAN

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan gebrakan strategis dengan mengundang dan membuka Rapat Kerja Nasional Gerakan KB tahun 2005 di Istana Negara, Jakarta. Sepintas Rapat Kerja Nasional yang dibuka oleh seorang Presiden di Istana Negara adalah suatu hal yang biasa. Rapat Kerja bidang kependudukan dan KB di masa lalu, pada masa Presiden HM Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, atau Presiden Megawati Soekarnoputri, juga dibuka oleh Presiden di Istana Negara.

Dalam suasana perhatian dunia terhadap masalah kependudukan sedang berubah bentuk seperti sekarang ini, gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengandung harapan yang besar bahwa Indonesia bisa kembali menjadi pionir dalam mengembangkan pemberdayaan penduduk yang besar sebagai kekuatan dan modal pembangunan bangsa atau *human capital*.

Indonesia yang miskin tetapi mempunyai penduduk dengan jumlah besar, apabila ditangani dengan pemberdayaannya secara terpadu, dengan mengundang partisipasi semua kekuatan pemangungan yang tinggi, akan

menghasilkan sumber daya manusia bermutu yang besar jumlahnya. Kalau setiap warga menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan negaranya, hampir pasti negara yang besar dan kaya raya ini akan muncul sebagai negara besar yang sejahtera, adil dan makmur.

Dengan penduduk lebih dari 215 juta jiwa mempunyai potensi yang makin siap untuk membangun bangsanya. Dalam tigapuluh tahun terakhir tingkat kelahiran dan tingkat kematian sudah menurun lebih dari 50 persen. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduknya telah menurun dari angka diatas 2 persen menjadi hampir dekat dengan angka 1,2 – 1,3 persen. Bahkan beberapa propinsi, kabupaten dan kota telah menunjukkan angka sekitar 1 persen.

Makin siapnya penduduk dikembangkan menjadi potensi pembangunan yang kuat itu ditandai pula dengan jumlah penduduk dibawah usia limabelas tahun yang relatif tidak bertambah lagi, yaitu sekitar 60 – 65





juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, apabila kita bekerja dengan keras, tidak mustahil tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan awal dari penduduk tersebut dapat diberikan dengan baik. Pemeliharaan kesehatan dan pendidikan dalam usia dini akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang di kemudian hari dapat menghasilkan manusia unggul dan bermutu yang bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan bangsa.

Penurunan tingkat kelahiran dan kematian juga menyebabkan melejitnya usia harapan hidup dari angka dibawah 50 tahun menjadi 65 tahun atau lebih. Angka-angka itu relatif tinggi tetapi masih rawan untuk menurun kembali karena angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, sekitar 300 per 100.000 kelahiran, atau sekitar 30 sampai 40 kali lebih besar dibandingkan angka yang sama di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia.

Gebrakan Presiden SBY dengan menggelar Rapat Kerja Nasional di Istana harus segera diikuti dengan menggelar program kesehatan ibu dan anak secara besar-besaran di tingkat pedesaan. Program ini harus disiapkan dengan baik untuk menolong ibu muda yang karena kemiskinan dan pendidikan yang rendah terpaksa menikah pada usia muda.

Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, perkawinan usia muda biasanya tidak disertai dengan persiapan pengetahuan reproduksi yang matang, dan tidak pula disertai oleh kemampuan mengakses pelayanan kesehatan yang masih dianggap mahal. Ironisnya, keengganan mengakses pelayanan kesehatan itu juga disebabkan karena peristiwa mengandung dan melahirkan belum dianggap sebagai sesuatu keadaan yang harus dikonsultasikan ke Posyandu, Puskesmas, atau ke dokter dan rumah sakit.



Karena sifatnya menolong ibu-ibu muda yang subur, maka tugas menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu, dan selama ini menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan dan jajaran Penda terkait, harus dirombak dengan sistem baru yang menjemput bola sampai ke tingkat pedesaan dan pedukuhan. Jajaran pemerintah harus mampu memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk usia subur dan mereka yang siap mengandung dan melahirkan.

Begitu juga pemerintah daerah harus mampu memperhitungkan jumlah anak-anak yang rawan penyakit yang bisa mengganggu tingkat kematian yang sudah rendah. Andaikan aparat pemerintah tidak mencukupi, jajaran pemerintah harus tanggap dan dengan cepat mengembangkan pemberdayaan dan suasana yang kondusif bagi munculnya pelayanan mandiri yang bermutu dan murah.

Dalam waktu yang bersamaan, Jajaran Departemen Dalam Negeri, Jajaran BKKBN, dan Pemerintah Daerah, dengan mitra-mitra kerjanya, harus dengan gesit mengembangkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat, keluarga dan penduduk, makin gandrung terhadap pelayanan kesehatan dan KB secara mandiri.

Masyarakat harus mendapat informasi dan edukasi yang mendalam, kalau perlu diberikan contoh dan pendampingan untuk hidup sehat dan ber-KB dengan teratur. Dengan advokasi yang jujur aparat pemerintah harus bisa mengembangkan suasana yang kondusif, mampu merangsang masyarakat untuk melakukan kegiatan yang mandiri dan bermutu. Kalau perlu aparat pemerintah mendampingi dan diperbantukan kepada masyarakat agar biaya pelayanan yang diberikan secara mandiri tidak membebani masyarakat diluar kemampuannya yang wajar.



Disamping itu, secara jelas dapat dilihat bahwa penduduk yang berusia 15 – 45 tahun, atau penduduk dewasa yang potensial dan bisa dianggap siap, atau harus siap untuk bekerja, jumlahnya melipat dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang sama pada tahun 1970-an.

Gambaran ini memberi peringatan kepada kita, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa persiapan-persiapan yang cermat harus dilakukan untuk menolong penduduk usia potensial tersebut. Kurang dari sepertiga penduduk usia 15 – 25 tahun tersebut sedang sekolah atau kuliah, yaitu sekitar separo dari penduduk usia SMA sedang sekolah di SMA, dan hanya sekitar 10 – 12 persen saja dari penduduk usia perguruan tinggi sedang mengikuti kuliah.

Lebih separo anak-anak dan remaja usia SMA tidak sekolah. Sangat jarang anak-anak dan remaja yang tidak sekolah tersebut memperoleh kesempatan membekali dirinya melalui berbagai pelatihan ketrampilan yang ada di masyarakat karena alasan kesulitan ekonomi atau karena alasan lainnya.

Lebih dari itu, karena warisan masa lalu yang sangat memprihatinkan, banyak penduduk usia diatas 25 tahun mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat minim. Masih banyak yang tidak pernah mengenal bangku sekolah selama hidupnya. Karenanya, pada penduduk diatas usia 25 tahun masih didapati banyak yang buta aksara.

Kita belum sanggup mengentaskannya. Kalau diperhitungkan secara seksama, rata-rata lamanya penduduk Indonesia bersekolah tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Angka yang sangat rendah tersebut menyeret nilai *Human*



Development Index (HDI) manusia Indonesia pada posisi yang sangat rendah.

Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan himbauan agar para gubernur, bupati dan walikota menggerakkan kembali program KB dengan lebih gencar, karena kalau tidak, keadaan bisa bertambah gawat. Konsumsi BBM dan kebutuhan lainnya akan membengkak. Tidak ada lagi tersisa untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan anak-anak dan persiapan pengembangan lapangan kerja yang lebih luas.

BKKBN harus segera menggelar kerjasama yang erat, minimal dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Dalam Negeri serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, BKKBN harus segera melakukan inventarisasi di pedesaan terhadap keberadaan anak-anak usia SMP dan SMA yang tidak sekolah. Harus dicari sebab-sebabnya kenapa mereka tidak sekolah.

Kalau kekurangan sekolah, Departemen-departemen tersebut, bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten dan kota, harus segera mengadakan sekolah dan melengkapi kebutuhan sekolah yang diperlukan. Kalau karena himpitan kemiskinan, jajaran BKKBN harus segera mengadakan kerjasama dengan Departemen dan lembaga yang ditugasi pemerintah, serta dengan lembaga-lembaga swasta lainnya, untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi keluarga agar keluarga tertinggal tersebut bisa mengirimkan anak-anaknya ke sekolah.

Jajaran BKKBN harus segera bertindak cepat. Bukan menggantikan peranan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja, tetapi membantu pemerintah kabupaten dan kota menggerakkan keluarga



dan masyarakat untuk menggandrungi pendidikan karena hanya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai potensi sumber daya manusia yang melimpah dapat memberi menyumbang pada pembangunan bangsa dan tanah airnya.

BKKBN dapat mengembangkan advokasi dan mengikis habis hambatan-hambatan kultural dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan semua yang berpikiran jernih, untuk mengajak masyarakat secara gotong royong mengirim anak-anaknya ke sekolah.

Apabila keengganan sekolah itu karena alasan ekonomi, BKKBN dapat merangsang masyarakat untuk bekerja sama dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja untuk membuka kursus-kursus ketrampilan agar hambatan kemiskinan dapat diatasi dengan mengirim anak-anak dan remaja ke kursus-kursus ketrampilan yang segera menghasilkan tenaga trampil untuk siap bekerja.

Untuk menampung meluapnya tenaga trampil tersebut, dengan komitmen dan dukungan Presiden, pemerintah harus segera menggerakkan pembangunan yang pro rakyat kurang mampu, mengerahkan pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif dengan memberi kesempatan kerja kepada tenaga terampil yang disiapkan tersebut.

Usaha-usaha ini dapat dipacu dengan dana bank yang direncanakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah disertai dengan kampanye secara besar-besaran untuk mencintai produk dalam negeri. Sejalan dengan itu dikembangkan pula pasar-pasar di pedesaan yang bisa menjadi ajang untuk mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan di tingkat pedesaan.



Sejalan dengan itu Departemen Pendidikan Nasional dan jajaran Pemda di seluruh Indonesia harus menyediakan fasilitas pendidikan dengan mutu yang terbaik. Departemen ini sekaligus harus menyempurnakan sistem pendidikan nasional untuk mampu menghasilkan lulusan yang tidak saja unggul dalam bidang akademis, tetapi juga unggul dalam bidang ketrampilan dan kemasyarakatan.

Setiap lulusan sekolah harus bisa menjadi rebutan berbagai perguruan tinggi dan masyarakat luas yang segera ingin mengisi pembangunan bangsa dan tanah airnya. Sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Bahkan sekolah-sekolah umum ditambah jam belajarnya sampai sore dan kalau perlu sampai malam hari. Setiap anak diberikan kesempatan mempelajari materi dan praktek ketrampilan.

Kalau pemerintah, karena kelangkaan anggaran belum mampu menyediakan guru, pembimbing atau peralatan, masyarakat luas, khususnya para pengusaha dihimbau untuk membantu menyediakan diri sebagai tempat magang dan pelatihan bagi siswa yang berada di sekitar tempat usahanya.

Sebagai imbalan dari sekolah di masyarakat tersebut, para pengusaha pejuang diberikan kesempatan mendapatkan tambahan modal melalui kredit dan permodalan dengan fasilitas yang disederhanakan. Produk mereka dibantu pemasarannya sebagai komoditi lokal dan produk dalam negeri yang harus dicintai rakyatnya. Pembelian-pembelian pemerintah diarahkan secara sengaja kepada produk-produk yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri yang sekaligus ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut.

Penduduk usia diatas 45 tahun, atau diatas 60 tahun, jumlahnya meledak tiga sampai lima kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1970-an. Kesempatan



harus dibuka agar mereka bisa ikut dalam pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Para isteri petani di pedesaan diberdayakan dalam bidang industri dengan bahan baku dari hasil pertanian dan produk di desanya.

BKKBN yang mengetahui dengan pasti keadaan keluarga di pedesaan melalui hasil pendataan tahun-tahun sebelumnya, harus ditugasi tetap mengembangkan data yang akurat agar pemberdayaan dapat diarahkan oleh berbagai instansi dan masyarakat secara akurat. Kemampuan pendataan harus menyertai upaya pemberdayaan yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai lembaga dan masyarakat. Kemajuan pemberdayaan keluarga diukur dari partisipasi yang penuh dari keluarga kurang mampu yang bertambah baik.

Sesuai pidato Presiden, BKKBN harus bekerja keras untuk menjamin agar setiap penduduk, terutama penduduk dari keluarga kurang mampu, bisa berpartisipasi dan mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan, terutama partisipasi dalam bidang ekonomi keluarga, yang harus diikuti dengan jumlah yang meluas.

Partisipasi yang luas akan menjamin dukungan pembangunan untuk mencapai target-target *Millenium Development Goals (MDGs)*, dan atau meningkatnya *Human Development Index (HDI)*, atau makin membaiknya mutu penduduk dan masyarakat Indonesia. Gebrakan Presiden tidak boleh disimpan dalam *file komputer*, tetapi harus segera diikuti gerakan pembangunan dengan menempatkan manusia sebagai titik sentralnya, yaitu gerakan pembangunan komprehensif terpadu yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan mutu manusia.

D



MEMBANGUN KOMITMEN DAN DATA BASIS

Beberapa waktu lalu, ada dua Seminar yang berkaitan dengan kependudukan yang sangat menarik. Pertama, Panitia Bersama Peringatan Hari Kemerdekaan RI menggelar Seminar Masalah Kependudukan pada tanggal 19 Agustus di Jakarta dengan pidato utama oleh Calon Presiden RI 2004, Bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan kini menjadi Presiden RI. Kedua, Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM) pada tanggal 21 Agustus menggelar Seminar Pengembangan Manusia di Surabaya dengan pidato utama oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Hari Sabarno pada waktu itu.

Kedua Seminar itu diikuti pakar dan fungsionaris dari berbagai bidang, serta peserta yang umumnya sangat peduli terhadap masa depan bangsa, terutama sangat prihatin terhadap masa depan penduduk Indonesia yang melimpah jumlahnya. Peserta tidak saja sadar bahwa mutu penduduk dan masyarakat Indonesia masih rendah, tetapi melalui berbagai program telah memberdayakan manusia agar mampu berperan secara aktif. Namun, kemiskinan yang menjerat bangsa masih



merupakan halangan yang tidak ringan.

Kemiskinan telah menghambat usaha mendidik dan melatih bangsa ini untuk memiliki kemampuan dan profesi yang lebih memberi nilai tambah yang menguntungkan. Anak-anak dan anggota keluarga yang tidak terampil, bekerja keras dengan otot, kadang-kadang dengan perut kosong, siang dan malam, tetapi mendapat upah yang tidak memadai.

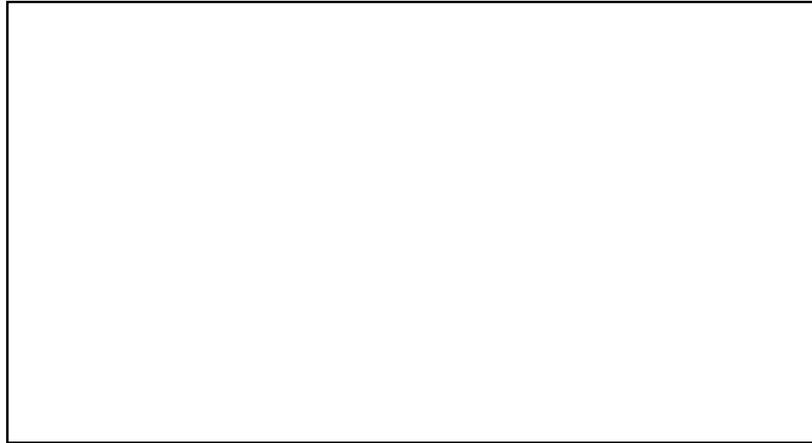
Oleh karena itu, para peserta sepakat mengambil hikmah dari Seminar yang membuka cakrawala itu untuk segera memperkuat komitmen bersama membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, mandiri dan berbudaya. Mereka juga sepakat untuk mengembangkan suasana yang kondusif sehingga upaya pemberdayaan bisa didukung pelayanan kesehatan yang memadai.

Setiap anak bangsa, dengan pelayanan kesehatan itu tumbuh kembang dari saat yang sangat dini menjadi manusia dewasa yang mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dengan wajar, sebagai bekal untuk menjadi aset bangsa yang dapat diperhitungkan.

Ada tindak lanjut yang segera harus dirampungkan. Disamping komitmen politik yang memungkinkan pengembangan manusia yang berkelanjutan, untuk mengembangkan strategi bersama dan kerjasama yang lebih erat, perlu pengetahuan yang mendasar tentang posisi yang ada dewasa ini dan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah, oleh Bupati dan Walikota, serta masyarakat luas.

Untuk itu perlu segera diambil langkah menyatukan langkah dengan antara lain mengumpulkan data dasar, memotret situasi kabupaten kota,





dengan mengecek langkah-langkah strategis yang telah diambil dan harapan dalam upaya pengembangan mutu penduduk dan masyarakatnya. Pencapaian sasaran yang tepat akan memungkinkan rakyat dan bangsa Indonesia memenuhi komitmen pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)* atau peningkatan mutu penduduk.

Dengan data yang lebih terperinci dan penyajian yang telah disampaikan dalam dua Seminar yang menarik itu sebagai bahan, akan bisa disusun suatu Model untuk mengembangkan strategi dan program-program yang kiranya bakal mempunyai dampak yang tinggi terhadap upaya yang bisa dilaksanakan dalam masa lima tahun mendatang. Rumusan Model itu bisa menjadi acuan yang dapat dijadikan bahan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun komitmen politik dan mengembangkan program-program yang membawa manfaat bagi rakyat banyak.

Beberapa data dan indikator yang segera harus dikumpulkan secara





terperinci untuk setiap kabupaten atau kota adalah antara lain sebagai berikut : dalam ***Bidang Pengentasan Kemiskinan*** : Proporsi Penduduk dengan Pendapatan kurang dari US\$ 1.00 setiap hari, Proporsi Penduduk dengan Pendapatan kurang dari US\$ 2.00 setiap hari, Proporsi Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menurut ukuran Nasional, dan Proporsi Konsumsi Penduduk miskin dibandingkan dengan Konsumsi Nasional.

Dalam ***Bidang Kesehatan*** : Angka Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan, Prevalensi KB dan Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi remaja, Pengetahuan Remaja tentang Penyakit Kelamin dan HIV/AIDS, Fasilitas Kesehatan dasar yang tersedia seperti Puskesmas, Dokter, Bidan dan Para Medis, Posyandu, Polindes, dan Partisipasi Masyarakat dalam bidang kesehatan pada umumnya, Fasilitas air bersih dan proporsi cakupan penduduk yang telah memperoleh fasilitas tersebut, adanya rumah sakit atau dukungan untuk penduduk kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan.

Dalam ***Bidang Pendidikan*** : Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar – SD, SMP dan SMA, Angka Drop Out, Jumlah anak Kurang Mampu yang ditolong atau mendapat beasiswa, Angka Buta Huruf, Jumlah lembaga-lembaga Pelatihan untuk menolong anak Putus Sekolah atau Anak Tidak Sekolah.

Dalam ***Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Pendapatan*** : Angka Kemiskinan atau jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin, Prosentase Perempuan yang bekerja dalam Bidang Eksekutif, Prosentase Perempuan yang bekerja dalam bidang Legislatif, Jumlah



Keluarga yang mendapatkan Kredit Mikro untuk Pemberdayaan, Tingkat Pendapatan rata-rata Penduduk, Jumlah Koperasi dan anggotanya.

Dalam *Bidang Lingkungan dan Fasilitas Umum* : Luas Wilayah dengan Program Penghijauan, Luas Hutan Kota, Luas Daerah Serapan Air, Luas Daerah Lindung Biodiversity, Emisi Karbon per Kepala, Jumlah Sampah per Bulan/Tahun, Jumlah Sampah yang Diolah per bulan/tahun, Jumlah Pasar Desa, Panjang Jalan per Penduduk, Panjang Jalan Desa per Penduduk, Kualitas Udara, Kualitas Air, Jumlah Kendaraan, Kecepatan Rata-rata Kendaraan Roda empat, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, dan Jumlah Pertunjukan Tradisional, sebagai salah satu indikator terhadap pengembangan budaya daerah.

Dengan pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah diatas, apabila segera diikuti dengan program penyelesaian dengan komitmen dan berhasil merangsang partisipasi rakyat yang tinggi, akan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan mutu manusia secara nyata. Lebih dari itu akan memberi manfaat yang sangat luas kepada proses pengembangan manusia yang berkualitas, profesional, mandiri dan berbudaya.

D



GONJANG GANJING HDI DAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN

Setiap tahun *United Nations Development Programme (UNDP)*, salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa yang bertugas membantu pembangunan di negara-negara anggota PBB menerbitkan *Human Development Report*. Sejak diterbitkannya di awal tahun 1990-an penerbitan ini selalu melaporkan nilai HDI dari seluruh bangsa-bangsa di dunia dimana Indonesia selalu berada pada posisi yang rendah, jauh tertinggal dibandingkan dengan nilai HDI dari negara-negara Asean lainnya. Setiap tahun pula, pada saat penerbitan itu diumumkan di seluruh dunia, dan disiarkan secara luas, termasuk di Indonesia, selalu mendapat perhatian yang lumayan.

Laporan pokoknya banyak dikutip oleh media massa, dengan berbagai komentar, baik yang positif maupun yang negatif. Sebagian komentar itu benar, sebagian lagi sifatnya emosional dengan menyalahkan data yang dimuat, atau kesimpulan yang diambil. Namun, seperti peristiwa lainnya, habis komentar, habis pula nilai jualnya. Tidak banyak dilakukan tindakan dan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki, atau mengambil langkah-langkah konkrit pembangunan yang



tujuannya untuk memperbaiki keadaan agar menghasilkan penduduk dengan mutu dan nilai HDI yang lebih baik.

Tahun lalu, tahun 2003, posisi Indonesia berada pada urutan nomor 112 dari 175 negara. Posisi itu berada beberapa nomor dibawah Vietnam (nomor 109), yang ditahun-tahun sebelumnya, sebagai negara yang baru lepas dari cengkeraman peperangan, selalu berada dibawah posisi Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya posisi Indonesia sangat jauh tertinggal, karena umumnya berada dibawah angka 100, atau bahkan Singapura, nomor 25, selalu melejit bersama negara-negara maju lainnya.

Keadaan Indonesia dalam laporan tahun 2003, yaitu keadaan kita pada tahun 2001, masih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang menurun secara drastis akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemiskinan belum dapat diatasi atau bahkan cenderung stagnan, belum seluruhnya menurun, bahkan untuk beberapa komunitas masih banyak penduduk yang mengalami kemiskinan yang parah.

Keadaan tahun 2001 itu mulai dipengaruhi oleh data, atau *variabel*, yang diukur dalam indikator HDI, yang menunjukkan harapan yang cukup lumayan. Sebagai contoh, berkat keberhasilan Kesehatan dan KB misalnya, nilai Usia Harapan Hidup atau *Expectation of Life*, sebagai ukuran bidang kesehatan, menunjukkan angka yang tinggi karena menikmati hasil penurunan tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang terjadi dalam duapuluh lima tahun yang terakhir.

Angka partisipasi pendidikan yang diukur dari lamanya sekolah secara formal dan prosentase penduduk yang bisa membaca ikut menikmati hasil-hasil wajib belajar sembilan tahun yang menggembirakan. Hanya pendapatan



keluarga yang relatif menurun karena akibat krisis yang berkepanjangan.

Dalam laporan tahun sekarang ini, tahun 2004, yang umumnya merupakan laporan keadaan tahun 2002, posisi Indonesia berada pada nomor 111 dari 177 negara. Sebagai laporan keadaan tahun 2002 keadaan *variabel-variabel* tertentu relatif stabil. Dibandingkan angka index tahun 2001, HDI Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,010, yaitu dari 0,682 menjadi 0,692, atau suatu kenaikan sebesar 0,012 dibandingkan keadaan tahun 2000 sebesar 0,680.

Dalam laporan ini nampak adanya kemajuan di semua variabel yang menjadi ukuran pokok HDI, yaitu suatu kenaikan Usia Harapan Hidup dari 66,2 tahun menjadi 66,8 tahun, kenaikan tingkat membaca dari 87,3 persen menjadi 87,9 persen, kenaikan rata-rata partisipasi sekolah dari 64 persen menjadi 65 persen, dan kenaikan tingkat pendapatan rata-rata per kapita (*GDB*) dari US\$. 2940 menjadi US\$ 3230. Kenaikan-kenaikan itulah yang menyebabkan nilai HDI Indonesia naik dari 0,682 menjadi 0,691. Nilai baru itu mendongkrak posisi Indonesia pada tahun 2002 dari urutan ke 112 menjadi urutan ke 111 dari 177 negara.

Kita nampaknya mendapat bonus, karena dalam buku laporan tahun ini, yaitu keadaan Indonesia pada tahun 2002, posisi Indonesia berada satu angka diatas posisi Vietnam, yang tahun sebelumnya ditempati Indonesia. Tetapi kenaikan posisi ini tidak boleh dianggap sebagai kemajuan yang berarti. Dari pengamatan sementara nampak bahwa posisi Vietnam yang menurun dari urutan 109 ke urutan 112 sebenarnya bisa merupakan posisi semu.

Angka Usia harapan Hidup penduduk Vietnam, sebesar 69,0 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Indonesia sebesar



66,6 tahun. Tingkat kemampuan baca tulis sebesar 90,3 persen, lebih tinggi dari keadaan Indonesia sebesar 87,9 persen. Angka Partisipasi Vietnam ini sebenarnya bisa lebih tinggi, karena sebelumnya sudah mencapai tingkat partisipasi sebesar 92,7 persen.

Barangkali yang membuat posisi Vietnam satu tingkat lebih baik dari Indonesia adalah Angka Partisipasi Pendidikan Dasar di Vietnam sebesar 64 persen, sedikit lebih rendah dengan keadaan Indonesia sebesar 65 persen. Biarpun angka Vietnam ini meragukan, karena sebelumnya telah mencapai angka sebesar 64 persen.

Bisa saja karena angka baru belum ada, UNDP mempergunakan estimasi sama dengan angka tahun sebelumnya. Yang lebih menentukan kenapa posisi Vietnam lebih baik dibanding posisi Indonesia adalah



melompatnya tingkat pendapatan penduduk Indonesia dari rata-rata sebesar US\$ 2940 menjadi US\$ 3230, dibanding Vietnam yang hanya meningkat dari US\$ 2070 menjadi US\$ 2300.

Bagi Vietnam relatif agar sukar untuk meningkatkan pendapatan rata-rata tersebut karena jumlah penduduk miskin dibawah US\$ 1 sehari masih sekitar 17,7 persen, sedangkan untuk Indonesia sudah sekitar 7,5 persen. Jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan US\$ 2 sehari juga lebih baik di Indonesia, yaitu sebesar 52,4 persen, sedangkan di Vietnam masih sekitar 63,7 persen.

Ada lagi perbandingan yang menarik. Rata-rata tingkat pendapatan penduduk Indonesia sebesar US\$ 3230 itu belum mencapai keadaan terbaik Indonesia pada tahun 1997 sebesar US\$ 3430. sedangkan Vietnam dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar US\$ 2300 adalah keadaan mereka yang terbaik dalam lima tahun yang terakhir ini.

Keadaan Indonesia yang agak lebih baik tahun ini dibandingkan dengan Vietnam tetap harus disikapi secara hati-hati. HDI untuk kaum perempuan Vietnam sebesar 0,689 menempatkan negara itu pada ranking 87, sedangkan HDI perempuan untuk Indonesia sebesar 0,685 menempatkan Indonesia pada ranking 90.

Rendahnya ranking perempuan Indonesia itu antara lain karena Usia Harapan Hidup perempuan Vietnam sebesar 71,4 tahun lebih tinggi dibandingkan Usia Harapan Hidup perempuan Indonesia sebesar 68,6 tahun. Begitu juga tingkat kemampuan baca tulis perempuan Vietnam sebesar 86,4 persen lebih baik dibandingkan dengan kemampuan perempuan Indonesia sebesar 68,6 persen.



Sedangkan angka-angka indikator lain untuk perempuan Indonesia seperti tingkat pendapatan rata-rata dan partisipasi pendidikan dasar, biarpun tidak terlalu menyolok, keadaan rata-rata perempuan kita lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan Vietnam.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak terlalu terkenal, tetapi kita kalah dalam urutan ranking, seperti Syria, Algeria, Iran, China, Kyrgystan, dan Uzbekistan misalnya, adalah karena Indonesia kalah dalam penanganan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan barangkali kalah kuat dalam meningkatkan pendapatan rata-rata penduduknya. Akibatnya negara-negara tersebut relatif mempunyai tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang lebih menguntungkan rakyatnya.

Hasilnya adalah tingkat mutu penduduk perempuan negara-negara itu lebih baik dibandingkan dengan mutu penduduk perempuan Indonesia pada umumnya. Kalau ini berlangsung lebih lama, tidak mustahil mutu penduduk Indonesia akan kembali terpuruk dan berada dibawah ranking dari penduduk negara Vietnam, atau bahkan dibawah negara lain yang lebih terbelakang dewasa ini.

Menurut observasi lain, yaitu analisis UNDP tentang upaya memenuhi delapan target *Millennium Development Goals (MDGs)*, Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Promosi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Kematian Anak, Peningkatan Kesehatan Ibu, Penanggulangan HIV / AIDS, Pelestarian Lingkungan, dan Penggalangan Kerjasama, laporan UNDP masih melihat adanya kesenjangan menuju pencapaian target yang disepakati untuk dicapai pada tahun 2015.

Kesenjangan itu bersifat antar daerah, dan dalam tataran yang



mencolok juga dalam hal partisipasi dan penanganan kaum perempuan, anak-anak dan remaja, merupakan tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Masih diperlukan kesamaan pandangan, program yang mudah dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta komitmen yang secara kuat mengalir sampai ke tingkat akar rumput.

Sekelumit tantangan itu merupakan sebagian kecil saja dari banyak rintangan aktual terhadap upaya pengembangan manusia, terutama kaum perempuan, anak-anak dan remaja, yang sehat, bermutu, mandiri, demokratis dan berbudaya. Oleh karena itu semua pihak, dalam membangun bangsa ini, secara sadar dan sungguh-sungguh diharapkan menempatkan penduduk, utamanya kaum perempuan, sebagai titik sentral pembangunan.

Pembangunan perempuan, anak-anak dan remaja akan memberdayakan keluarga dan masa depannya sebagai institusi yang makin mandiri. Kesempatan keluarga untuk berbagi tanggung jawab dengan masyarakatnya menjadi lebih dimungkinkan, sehingga sejak anak dini usia, anak-anak dan remaja, maupun ketika keluarga itu harus memilih kedua orang tua harus bekerja karena tuntutan ekonomi, anak-anak bisa seluruhnya sekolah karena mampu mendapat dukungan orang tuanya.

Kemampuan orang tua membiayai keperluan anak-anak dan seluruh anggota keluarga itu akan menunjukkan kemampuan keluarga yang lebih luas, sehingga bisa menjadi wahana pembangunan bangsa yang terpercaya.

Sejalan dengan itu, disamping harus dikembangkan strategi dan sasaran yang tepat, perlu dikembangkan lembaga yang cocok untuk menangani kaum perempuan khususnya dan penduduk pada umumnya. Untuk memberdayakan kaum perempuan, anak-anak dan remaja dibutuhkan



kekuatan yang terfokus, sehingga dengan adanya lembaga pada tingkat pemerintah puncak, pada tingkat regional, dan pada tingkat akar rumput di kabupaten dan kecamatan desa, diharapkan akan ada komitmen yang berkelanjutan.

Komitmen yang berkelanjutan ini akan lebih mudah diterjemahkan dalam program-program pendampingan untuk memberdayakan masyarakat dan keluarga yang ada di tingkat pedesaan. Barangkali pengaturan struktural seperti ini masih diperlukan minimal untuk satu generasi yang akan datang.

Untuk pengaturan itu diharapkan dalam pemerintahan yang baru nanti ada baiknya tetap dipertahankan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan tugas membangun aliansi dan kerjasama antar berbagai Kementerian, Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Pusat dan Daerah, serta para pemimpin masyarakat secara luas.

Akan lebih baik kalau tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sekaligus dijadikan satu dengan tugas untuk mengembangkan manusia atau menangani masalah kependudukan pada umumnya. Atau dengan kata lain dibentuk suatu kementerian baru dengan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan.

Dengan lembaga baru, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan yang kuat akan bisa dikembangkan komitmen, kajian dan kebijaksanaan yang diramu dari munculnya permasalahan kependudukan pada prioritas yang tinggi, yaitu pemberdayaan perempuan, anak-anak dan remaja.

Pemberdayaan dengan prioritas perempuan, anak-anak dan remaja



itu akan menjadi tumpu dari usaha memenuhi kebutuhan rakyat banyak untuk mengembangkan penduduk yang bermutu, mandiri, demokratis dan berbudaya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling lama satu generasi, sehingga kaum perempuan, anak-anak dan remaja, akan menjadi pelaku pembangunan yang dinamis dan mampu menyajikan Indonesia baru yang adil dan makmur.

Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan itu diharapkan bisa mengembangkan aliansi dengan berbagai lembaga dan instansi lain di tingkat paling tinggi dan di tingkat akar rumput untuk menjadikan kekuatan penduduk sebagai kekuatan maha besar bangsa yang bermutu, trampil dan sanggup mengantar seluruh bangsa dan negaranya pada suasana yang penuh dengan kedamaian, kesejukan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang adil dan beradab.

D



MENGISI HARI KEPENDUDUKAN DUNIA

Masyarakat Jawa Timur, mewakili masyarakat Indonesia yang maju, diwakili oleh Gubernur, Bupati, Walikota, para pejabat teras, Swasta, kalangan akademisi dari berbagai Universitas, tenaga profesi seperti dokter dan bidan, lembaga keuangan seperti Bank, dan banyak generasi muda, seperti mahasiswa dan pelajar, telah memperingati Hari Kependudukan Dunia dengan karya nyata di Universitas Merdeka, Malang.

Karya nyata itu diilhami kenyataan bahwa biarpun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, tanpa pemberdayaan yang berarti, peningkatan mutu secara konsisten, tidak akan banyak gunanya. Penduduk yang kualitasnya rendah akan merepotkan bangsa ini mengatur pembangunan dan meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Sadar akan keadaan itu, Propinsi yang sangat sukses dalam pelaksanaan KB dan pembangunan manusia, bergerak sangat cepat merapikan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu penduduknya. Dalam upaya itu beberapa waktu lalu Gubernur Jatim telah mengambil prakarsa meningkatkan cakupan anak-anak dan remaja dalam pendidikan secara formal dengan memberi bantuan pembebasan SPP bagi anak-anak keluarga





kurang mampu untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

Harapannya adalah bahwa dengan kemudahan itu besarnya cakupan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, yang belum mencapai angka seratus persen, bisa segera naik dan mencapai angka seratus persen. Dengan pembebasan SPP hambatan fisik yang utama dapat dihilangkan. Melihat langkah itu para Bupati dan Walikota serta jajarannya sedang bekerja keras merangsang masyarakatnya untuk tidak menahan anak-anaknya mengikuti wajib belajar sembilan tahun tersebut.

Disamping itu, Gubernur dan pemerintah daerah yang terkenal dinamis itu telah melihat adanya kemampuan masyarakat yang makin meningkat, disertai kesadaran akan ber-KB secara mandiri, minggu lalu telah berkenan meresmikan gerakan KB Mandiri dengan memberikan restu terhadap kerjasama antara Ikatan Bidan Indonesia (IBI) propinsi Jawa Timur dengan Bank BPD Jatim dan Bank Bukopin di Jawa Timur.

Kerjasama itu memungkinkan diperolehnya kredit sehingga bidan bisa memberikan pelayanan secara mandiri kepada para peserta di pedesaan. Kemudahan itu juga memungkinkan akseptor KB yang ada di seluruh pelosok propinsi Jawa Timur melanjutkan kesertaannya dalam KB dengan tenang. Kemudahan kredit juga akan memungkinkan peserta KB untuk tidak tergantung kepada pelayanan KB secara cuma-cuma yang makin langka dewasa ini.

Dengan kemudahan sistem kredit itu para peserta KB yang sibuk, dan banyak bekerja di sektor perdagangan dan industri kecil, tidak harus lagi antri di Puskesmas, atau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang buka pagi hari. Mereka yang bekerja pagi hari, di pasar atau sibuk mengolah



usahanya, bisa tetap bekerja keras. Ibu-ibu bisa secara pribadi mengadakan perjanjian dengan bidan yang ada di desanya. Mereka bisa datang pada sore atau malam hari setelah kegiatan usaha ekonomi produktif pada pagi dan siang hari telah diselesaikan dengan baik.

Upaya masyarakat Jawa Timur mengisi Hari Kependudukan Dunia itu tergolong unik dan patut diacungi jempol. Upacara yang meriah itu dilaksanakan di Kampus Universitas Merdeka Malang, yang secara tidak langsung merupakan simbol diraihnya kemerdekaan bagi para ibu untuk ikut memberikan sumbangannya pada upaya memajukan tanah air dan bangsanya.





Upacara itu juga unik karena bersamaan waktunya dengan langkah nyata kerjasama aliansi antara Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM) dengan Universitas Merdeka Malang. Kerjasama itu ditandai dengan penyerahan dukungan untuk mahasiswa Universitas Merdeka Malang bekerjasama “Membangun Manusia Indonesia yang Mandiri, Demokratis dan Berbudaya” melalui pemberdayaan masyarakat dan penduduk di sekitar kampus Universitas Merdeka Malang.

Dengan kerjasama itu para dosen dan mahasiswa Unmer akan menyatu dengan masyarakat sekitar kampusnya dalam upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, utamanya keluarga kurang mampu, dalam usaha ekonomi produktif yang tidak saja menguntungkan masyarakat, tetapi juga akan memberi pengalaman berharga untuk para dosen dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu.

Bahkan, tidak mustahil kegiatan itu bisa menghasilkan tesis atau disertasi yang meneliti dan membahas secara ilmiah upaya-upaya pembangunan dengan model nyata, hidup dan bisa dilaksanakan dengan baik pada masyarakat kurang mampu.

Kalau kerjasama dengan para bidan akan memudahkan para peserta KB mengakses pelayanan bidan secara mandiri, diharapkan kerjasama pengembangan manusia merupakan langkah lebih maju dari perhatian kita terhadap penduduk Indonesia yang melimpah jumlahnya. LPIM dengan aliansinya telah bertekad untuk menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan.

Dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral berarti penduduk akan dan harus disiapkan secara paripurna menjadi insan yang mampu,



mandiri, demokratis dan berbudaya, sekaligus sebagai makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kekuatan seperti itu diharapkan Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang melimpah akan dengan mudah bangkit dengan kekuatannya sendiri yang maha dahsyat.

Apabila dicermati dengan baik, upaya pemberdayaan itu telah diberi kekuatan hukum yang sangat dinamis melalui UU nomor 10 tahun 1992, yang sekaligus memberi kesempatan kepada setiap keluarga untuk menjadi wahana pembangunan bangsa. UU itu juga mengatur pelaksanaan program KB dan Kependudukan yang tidak saja harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat dikembangkan menjadi gerakan yang dikelola oleh masyarakat sendiri secara mandiri.

Peristiwa itu sekaligus merupakan karya nyata dari anak bangsa untuk mulai menata kekuatannya secara konsisten. Upaya itu sekaligus bisa menjadi awal dari gerakan menempatkan penduduk yang melimpah sebagai aset bangsa yang luar biasa potensinya. Keluarga Indonesia yang dikembangkan menjadi wahana pembangunan kiranya akan menjadi lembaga yang penting untuk menempatkan penduduk sebagai kekayaannya yang paling tinggi dan sebagai kekuatan maha dahsyat yang mampu mengatasi segala kemelut di negerinya sendiri, Indonesia, secara mandiri.

D



PEMBANGUNAN WILAYAH BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Pemilu merupakan suatu perwujudan yang menarik dari upaya pembangunan politik berwawasan kependudukan. Pemilu yang didahului dengan suatu kampanye, yang dimulai pertengahan minggu ini, memberi kesempatan kepada setiap penduduk yang berhak memilih untuk mendapatkan informasi tentang kader-kader terbaik bangsa yang dianggap pantas untuk dipilih.

Selama kampanye, sayang hanya beberapa hari saja, penduduk memperoleh kesempatan yang luas memberdayakan dirinya dengan mengetahui sebanyak mungkin keterangan tentang kader-kader yang akan dipilihnya. Pengetahuan ini diperlukan agar setiap penduduk mampu melakukan pilihan atas wakil-wakilnya yang dipercaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya di DPR, DPRD, atau bahkan dalam kursi tertinggi Presiden dan Wakil Presiden, secara bijaksana dan demokratis.

Barangkali, mungkin sejalan dengan semangat yang sama, mulai awal minggu ini Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pelatihan untuk para pejabat teras dari berbagai daerah tentang Pembangunan Wilayah Berwawasan Kependudukan. Pelatihan penting yang tepat waktu itu diisi

oleh ahli-ahli pembangunan dan kependudukan seperti DR. Rohadi Hariyanto, MSc., Dr. Anto Achadiyat, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherjanto, Drs. Seman Widjojo, Ir Tatag Wiranto, MURP, Prof. Dr. Ir. Hadi Ali Kodra, MSc, Ir Wahyudi WP, Ir. Bambang Kustedjo, Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, dan Prof. Dr. Haryono Suyono.

Para ahli itu, bersama-sama atau sendiri-sendiri, akan membawakan pilihan topik yang terpadu untuk memberi bekal yang komprehensif bagi para pejabat daerah yang sejak beberapa tahun ini memperoleh kewenangan sekaligus tanggung jawab yang sangat berat membantu masyarakat di daerahnya membangun secara mandiri.

Dalam pembangunan model baru ini, yaitu dalam suasana otonomi daerah, dan terutama demokratisasi, mengharuskan setiap pejabat daerah





sangat diharapkan bekerja dalam suasana yang transparan, membuka kesempatan kepada setiap penduduk mengetahui pembangunan apa saja yang direncanakan, diarahkan atau dikerjakan oleh pemerintah agar rakyat bisa berpartisipasi dan mendapat manfaat secara penuh, bijaksana, bermutu dan demokratis.

Dalam alam demokratisasi ini, penduduk, biarpun sudah mewakili dirinya kepada para politisi di DPR dan DPRD, berhak melakukan pilihan langsung. Penduduk berhak mengoreksi pilihan wakil-wakilnya. Penduduk berhak menolak keputusan wakil-wakilnya yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Karena itulah, biarpun para birokrat, perencana dan pelaksana pembangunan, sudah banyak berpengalaman dalam pembangunan, tetapi karena masyarakat memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda, merekapun harus menyiapkan diri sesuai dengan fenomena baru itu.

Karena masyarakat memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda, maka tidak ada pilihan lain kecuali bahwa para birokrat atau pemerintah dan aparatnya, yang biasanya bertindak sebagai *koordinator atau pelaksana pembangunan*, harus berubah menjadi *advokator, fasilitator dan motivator pembangunan*.

Sebagai konsekwensi logis dari perubahan paradigma itu, maka penduduk, yang biasanya merupakan *sasaran pembangunan*, harus secara bertahap ditingkatkan menjadi *pelaksana pembangunan*. Suatu fenomena baru yang dalam ilmu kependudukan merupakan upaya pemberdayaan penduduk sehingga setiap penduduk tidak saja merupakan *sasaran* atau *obyek*, tetapi sekaligus mampu bertindak sebagai *subyek*, atau *aktor* pembangunan. Pendekatan pembangunan tersebut berubah menjadi *pendekatan pembangunan partisipatif*.



Istilah pembangunan partisipatif dimasa lalu bukan barang baru. Banyak upaya pembangunan di masa lalu dilakukan secara partisipatif, namun pendekatan partisipatif yang harus dikembangkan sekarang tidak saja dalam bidang-bidang tertentu. Pendekatan itu harus bersifat komprehensif dengan tujuan utama peningkatan kemampuan penduduk untuk melakukan pilihan secara mandiri dan demokratis.

Banyak sekali alasan untuk itu. Nilai *Human Development Index (HDI)* penduduk Indonesia demikian rendahnya, lebih rendah dari Vietnam yang baru merdeka, sehingga hampir tidak mungkin mengembangkan pendekatan partisipatif secara bermakna dan demokratis. Oleh karena itu dalam pendekatan partisipatif harus dimulai secara besar-besaran dengan upaya pemberdayaan penduduk yang bermutu dan berkesinambungan.

Tidak boleh dipungkiri, dimasa lalu pembangunan telah banyak memperhatikan faktor-faktor sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang disebut sebagai pembinaan sumber daya manusia. Upaya pembinaan penduduk itu antara lain melalui Program KB, Kesehatan dan Pendidikan. Pelayanan kesehatan dilakukan melalui jalur klinik maupun jalur Posyandu.

Berbagai upaya itu telah berhasil meningkatkan kualitas penduduk. Tingkat kematian bayi dan anak-anak menurun drastis, lebih 50 persen dalam kurun waktu hanya 25 tahun. Dengan tersedianya fasilitas KB dan kesehatan di tingkat desa, setiap penduduk tidak perlu membuat “anak cadangan” dalam menyusun kelengkapan keluarganya. Mereka cukup mempunyai anak dengan jumlah terbatas, memelihara kesehatan dan meningkatkan pendidikannya dengan baik.



Untuk keperluan itu, dengan segala keterbatasan, pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun. Di sekolah-sekolah, bagi anak keluarga kurang mampu, disediakan buku dan tambahan makanan bergizi agar upaya pembinaan komprehensif itu membawa hasil yang optimal. Wajib belajar menghasilkan angka partisipasi kasar pendidikan dasar meningkat dengan tajam, biarpun mutunya belum seperti diharapkan. Tingkat buta aksara generasi muda menurun drastis.

Peranan anak-anak perempuan dan usia kawin mereka juga meningkat secara signifikan. Anak-anak perempuan yang biasanya selalu tinggal di rumah menunggu lamaran untuk kawin muda tidak lagi kawin dibawah usia 15 tahun. Mereka kawin pada usia yang makin mendekati 20 tahun atau lebih. Bahkan banyak anak-anak perempuan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau bahkan pada sekolah menengah atas dan kuliah. Suatu fenomena yang sebelumnya langka.

Biarpun upaya pembinaan penduduk, laki-laki dan perempuan, berjalan dengan baik, namun dalam alam reformasi, hal ini dianggap tidak tepat. Cara itu dianggap bersifat menggurui dan atau instruktif, tidak merangsang kreatifitas dan kemandirian. Lebih-lebih lagi ternyata pembangunan lainnya banyak yang belum mengarah pada pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Cara pendekatan baru adalah pemberdayaan. Pemberdayaan mendorong munculnya kreatifitas dan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih merata kepada setiap penduduk.

Oleh karena itu keberhasilan pembinaan yang sekaligus menurunkan



fertilitas dan pertumbuhan penduduk pada tingkat makro nampaknya harus segera menjadi acuan untuk dilanjutkan dengan pemberdayaan pada tingkat mikro dalam lingkungan keluarga. Dengan mengemas secara manis keberhasilan itu harus bisa merangsang dan menggerakkan setiap keluarga untuk sadar atas perubahan struktur dan lingkungan sosial yang terjadi. Kesadaran itu harus diikuti pilihan alternatif yang kaya agar menghasilkan suatu *action* mandiri yang prakarsanya diambil oleh setiap keluarga secara demokratis.

Action tersebut harus makin dikembangkan untuk menyatu menjadi suatu gerakan pembangunan keluarga dan masyarakat madani yang mandiri dan berkualitas, sehingga muncul gerakan pembangunan berwawasan kependudukan secara komprehensif yang dilaksanakan dengan dan oleh masyarakat secara mandiri.

Pembangunan komprehensif dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral ini tidak boleh dibatasi hanya dalam bidang pembangunan kependudukan saja, misalnya dalam bidang reproduksi, semata-mata karena dimasa lalu sejarah program KB dimulai dalam bidang reproduksi.

Tetapi pembangunan itu harus menyeluruh, tetap dengan menempatkan pemberdayaan penduduk sebagai prioritas utama, yang harus diikuti dengan ***pengembangan lingkungan*** yang kondusif, serta ***pemberdayaan penduduk*** dalam ***bidang usaha*** agar mereka mampu memilih berbagai alternatif pilihan yang banyak secara bijaksana dan demokratis. Akhirnya menikmati pilihannya itu dengan tenteram dan damai.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan pelatihan harus diarahkan untuk menjadikan setiap penduduk mampu dan siap kerja (*broad*



based education) sebagai persiapan pembangunan keluarga dan individu yang sejahtera. Program ini terutama ditujukan kepada penduduk remaja yang karena sesuatu hal tidak berada atau tidak mampu mengikuti pendidikan secara formal. Termasuk di dalamnya anak-anak yang karena sesuatu sebab terpaksa harus *drop out* (DO) dari sekolahnya.

Pendekatannya adalah dengan memberikan penghargaan pada manusia dan kemanusiaan serta dukungan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mandiri. Pilihan mandiri itu adalah kemampuan melakukan pilihan partisipasi yang lebih baik dan peranserta yang dilakukan dengan cara demokratis.

Untuk itu, dalam kasus Indonesia, lembaga-lembaga pembangunan seperti Bappenas, BKKBN dan Lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan berwawasan kependudukan yang ada di tingkat pusat, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional, harus segera menyiapkan jaringan koordinasi dan pelayanan yang bersifat desentralistik mengikuti arah desentralisasi yang dikembangkan di tanah air.

Lembaga-lembaga tingkat pusat harus bersatu membantu pengembangan lembaga-lembaga daerah agar sesegera mungkin lembaga daerah itu mampu mengambil prakarsa secara mandiri, bergabung dalam bentuk aliansi yang otonom, dan sanggup melayani masyarakat dengan kualitas tinggi sesuai dengan aspirasi yang berkembang, bukan aspirasi lembaganya.

Dalam keadaan masyarakat yang makin maju, pelayanan harus makin bersifat *demand fulfillment* seperti pernah dikembangkan di tahun 1990-an.



Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah dan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab memberikan petunjuk yang bijaksana bagaimana memberikan advokasi kepada masyarakat untuk melakukan pilihan demokratis dengan penuh bijaksana.

Pengembangan jaringan pelayanan yang desentralistik itu harus makin bersifat mandiri dan diadakan oleh masyarakatnya. Pemerintah dan lembaga-lembaga tingkat pusat harus makin arif dan dengan legowo memberikan dukungan pemberdayaan tanpa ikut campur terlalu mendalam. Kemampuan masyarakat mengambil prakarsa harus dihargai dengan sebaik-baiknya untuk tidak menimbulkan frustrasi dan sifat masa bodoh yang merugikan kemandirian yang sedang tumbuh.

D





ULANG TAHUN KERJA KERAS

Tepatnya tanggal 11 September 1994 lalu, di Kairo, Mesir, para pemimpin dan ahli kependudukan dunia, mendeklarasikan pembentukan lembaga internasional *Partners for Population and Development*. Deklarasi itu diluncurkan sebagai sumbangan para pemimpin senior program kependudukan yang berhasil dan ingin membagi keberhasilannya kepada rekan lain yang sedang berjuang keras.

Untuk itu para pemimpin, ahli-ahli kependudukan dan pembangunan dari negara-negara Selatan-Selatan mengadakan pertemuan yang intensif berulang kali. Perembukan itu mencapai puncak di Jakarta pada tahun 1993 sebagai pertemuan kependudukan negara-negara Selatan-selatan, dan pertemuan para penggagas lainnya yang strategis pada tahun 1994 di Jakarta, dua-duanya dengan dukungan Presiden RI, Bapak Soeharto, yang kebetulan Ketua Gerakan Non Blok pada waktu itu.

Beberapa bulan sebelumnya para petinggi dari Selatan-Selatan telah bertemu di beberapa tempat, di Belagio, Itali dan New York, Amerika Serikat. Pembentukan *Partners*, lembaga pembangunan untuk mendukung kegiatan



di negara-negara berkembang, yaitu negara Selatan-Selatan itu, mendapat perhatian yang luar biasa dan bervariasi.

Biarpun dari awal dijelaskan bahwa lembaga *Partners* adalah sebuah lembaga semi pemerintah dengan tujuan menggalang kemitraan dan solidaritas antar bangsa di wilayah Selatan-Selatan untuk memerangi bahaya peledakan penduduk dan akibat-akibat buruk yang bisa terjadi, diantara negara Selatan sendiri ada yang curiga dan pesimis.

Kecurigaan itu dilandasi alasan jangan-jangan nama dan negara mereka dicatut untuk kepentingan segelintir oknum yang mempunyai kepentingan nasional atau kepentingan internasional yang tersembunyi. Beberapa lembaga internasional dan negara barat curiga jangan-jangan negara Selatan-Selatan yang bergabung, sebagian besar adalah negara yang bernaung dalam gerakan non-blok, menjadi jagoan dan menyaingi dominasi barat dalam mengatur perhalatan besar memerangi malapetaka dunia.

Biarpun ada tekanan badai yang cukup dahsyat, para penggagas, antara lain Menteri-menteri dari beberapa negara Selatan-selatan seperti Menteri Kesehatan Zimbabwe, Dr. Timothy Stamps, Menteri Sosial dan Kependudukan Tunisia, Dr. Geudana, Menteri Kependudukan Mexico, Dr. Gregorio Perez Palacios, Menteri Kependudukan Mesir, Dr. Mahran, Menteri Kependudukan Indonesia, Dr. Haryono Suyono, Direktur Kependudukan Rockefeller Foundation, Dr. Steve Sinding, dan lainnya, pantang menyerah. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan informal dalam kesempatan rapat dan seminar di beberapa tempat, antara lain di Belagio, Italia, di Markas PBB di New York, di Kantor UNFPA di New York, dan beberapa tempat lainnya, akhirnya, menjelang sehari setelah Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 1994, tepatnya tanggal 18 Agustus 1994, dengan bimbingan



Presiden RI, Bapak Soeharto, yang kebetulan pada periode itu sedang bertindak sebagai Ketua Gerakan Non Blok, para ahli itu mendapat dukungan politik agar lembaga ini segera dibentuk dan menunjukkan kerjanya secara nyata menggalang kerjasama antar negara-negara Selatan-Selatan, juga memfalisasi kerjasama dengan negara dan lembaga donor, dengan sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu pemrakarsa utama beliau juga memberi petunjuk agar para penggagas tidak mengambil posisi dominan dalam kepengurusan, dan kantor sekretariatnya ditawarkan kepada negara netral yang tidak menjadi salah satu penggagas gerakan ini.

Petunjuk itu disepakati sehingga digagas untuk deklarasi pembentukan lembaga ini dilakukan di Kairo, Mesir, saat dilangsungkannya perhalatan



Konferensi Kependudukan Dunia bulan September 1994 itu juga, atau kurang dari satu bulan setelah pertemuan di Jakarta.

Disepakati juga secara diam-diam untuk meminta Bangladesh menjadi tuan rumah kantor dari *Partners* yang akan dibentuk Di tengah gegap gempitanya Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo antara tanggal 9 – 17 september 1994 itu, *Partners in Population and Development* sebagai lembaga kerjasama antara Negara Selatan-Selatan dideklarasikan berdirinya. Hadir pada waktu itu wakil-wakil dari berbagai negara Selatan-Selatan maupun lembaga dan negara donor yang dominan.

Deklarasi yang cukup gegap gempita itu diikuti dengan pertemuan dan loby yang sangat intensif sehingga kesalah pengertian antar negara dan lembaga donor dapat dikurangi dan keinginan partisipasi negara-negara Selatan-Selatan dapat mulai dihimpun dengan hati-hati.

Disimpulkan juga bahwa pada tingkat awal kegiatan lembaga ini hanya boleh diikuti oleh sepuluh negara agar bisa dengan jelas dan berarti langkah-langkah yang diambilnya. Begitu juga agar dampak dari kegiatannya dapat dirasakan dan tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak berdasar.

Tidak lebih satu tahun dari masa deklarasi dan konsolidasi, pada pertengahan tahun berikutnya diadakan pertemuan antara negara-negara yang diharapkan menjadi anggota *Partners* yang pertama di Harare, Zimbabwe. Dalam pertemuan yang bersejarah itu Panitia Pembentukan *Partners in Population and Development*, yang dipimpin oleh Menteri Kependudukan Indonesia, menyerahkan pimpinan *Partners* kepada pengurus baru yang disusun sesuai dengan petunjuk dari Ketua Gerakan Non Blok.



Pengurus baru itu menempatkan para fungsionaris yang sebagian besar bukan berasal dari penggagas utama. Pengurus baru itu dipimpin oleh Tunisia, Sekretaris dari Indonesia, Bendahara dari Zimbabwe, dan anggota dari negara anggota lainnya. Lembaga donor yang sejak awal sangat aktif sebagai pendukung, yaitu Pimpinan *Rockefeller Foundation*, tidak ikut dalam kepengurusan sama sekali.

Tahun-tahun berikutnya *Partners* menjadi sangat sibuk mengatur kerjasama dengan PBB dan lembaga donor lainnya, mengurus struktur organisasi dan kantor yang kemudian disediakan oleh Pemerintah Bangladesh di Dhaka. Penyusunan pejabat administrasi itu mengharuskan pengisian pegawai profesional dan sekretariat dari tingkat internasional dengan kemampuan bahasa yang bervariasi serta kesediaan untuk berkunjung dengan lincah ke berbagai negara yang menjadi sasaran program.

Kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan fasilitasi kepada negara-negara yang bukan anggota tetapi memerlukan bantuan karena program dan kegiatan dalam bidang kependudukan dipandang masih perlu ditingkatkan.

Sejak dicanangkan, biarpun masih merupakan organisasi yang sangat muda, tetapi karena didukung oleh negara-negara dengan program yang sangat maju, seperti Indonesia, Thailand, Tunisia, Mesir dan lainnya, *Partners* langsung bisa menawarkan berbagai kemudahan untuk memberikan bantuan pelatihan kepada petugas-petugas kependudukan dari berbagai negara di negara-negara anggota atau negara penggagas pembentukan *Partners* tersebut.

Lembaga *Partners* langsung bisa menjadi semacam perantara untuk



menghubungkan lembaga donor dengan negara-negara yang membutuhkan serta mempermudah persetujuan dari negara penerima untuk bekerja sama memberi pelatihan kepada negara yang membutuhkan tersebut.

Tenaga-tenaga pelatih diambil langsung dari lapangan sehingga bahasa yang biasanya menjadi kendala, dapat diselesaikan dengan menggunakan bahasa isyarat, yang ternyata secara efektif bisa menjadi jembatan persahabatan antar negara. Lembaga-lembaga donor makin menyadari maksud dan tujuan pembentukan *Partners* sehingga dalam sepuluh tahun terakhir ini lembaga ini menjadi sangat sibuk menghubungkan antara negara yang membutuhkan bantuan dan negara berkembang lain yang dianggap mampu memberikan bantuan.

Melalui semangat kebersamaan itu beberapa tenaga ahli dari negara berkembang mulai dan bisa dijadikan konsultan ahli dari negara berkembang lainnya. Ahli-ahli tersebut, biarpun tidak mendapat kompensasi seperti halnya ahli yang berasal dari negara maju, karena harus dibiayai oleh sesama negara berkembang, telah menumbuhkan rasa bangga dan harga diri yang lumayan.

Kebanggaan itu menambah tidak saja curiositas dalam menuntut ilmu yang lebih tinggi, tetapi juga pengalaman luas yang berbeda suasana sosial budayanya. Pengalaman itu menambah pengayaan keilmuan dari ahli-ahli negara berkembang yang tanpa persahabatan antar negara berkembang hampir tidak mungkin dapat dikembangkan.

Indonesia sebagai negara yang dianggap maju mendapat berkah yang luar biasa menjadi tempat studi dan peninjauan dari sahabatnya yang berasal dari negara berkembang lainnya. Ribuan peserta pelatihan dari Bangladesh



telah menikmati pelatihan kependudukan, KB dan pembagunaan pedesaan di Indonesia.

Segera setelah kembali ke tanah air mereka, langsung mempraktekkan apa saja yang dilihat dan diterima di desa-desa di Indonesia. Kita tidak perlu heran kalau di banyak desa di Bangladesh ada saja model kepala desa seperti yang ada di desa di Jawa Timur, di Bali atau bahkan seperti pengelolaan program kependudukan seperti di desa di Sulawesi Selatan.

Saudara-saudara kita dari Republik Rakyat China juga rajin berkunjung ke program dan kegiatan kependudukan di Indonesia. Ribuan ulana dari China telah bertemu dengan para alim ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menjalin kerjasama dan mendapat petunjuk bagaimana peranan para alim ulama dalam memberikan dukungan moril kepada para peserta KB dan upaya pengentasan kemiskinan yang demensinya tidak saja dalam upaya peningkatan pendapatan fisik, tetapi juga kegiatan untuk meningkatkan iman dan taqwa yang erat hubungannya dengan masalah religiusitas dan spiritual.

Disamping memberikan dukungan sebagai penghubung antar “konsumen dan produsen”, pada perkembangan berikutnya lembaga *Partners in Population and Development* berkembang pula menjadi lembaga yang bisa menampung dan merumuskan kebutuhan bersama. *Partners* dengan dukungan para ahli yang diambil dari berbagai negara berhasil merumuskan bahan-bahan latihan dengan mengambil manfaat dari berbagai kelebihan yang ada di beberapa negara atau di beberapa lembaga pelatihan dan pengembangan yang maju.

Bentuk sinergi itu diwujudkan antara lain dalam latihan



kepemimpinan dalam bentuk *Visionary Leadership Training* yang kemudian ditawarkan melalui lembaga-lembaga pelatihan yang ada di negara-negara tertentu. Pelatihan itu, selain dengan materi hasil sinergy, juga bisa menghadirkan peltaih yang berasal dari berbagai negara atau dari berbagai profesi yang diperlukan untuk menghasilkan pemimpin masa depan dengan wawasan yang segar.

Program lain yang menarik adalah upaya bersama untuk menghadapi dominasi pelayanan yang biasanya selalu didukung dengan peralasan atau obat-obatan yang berasal dari negara barat. *Partners* dalam hal-hal tertentu telah berhasil meyakinkan beberapa negara berkembang yang maju untuk ikut serta dalam percaturan dunia dengan menyediakan produk dan tehnologi yang dikembangkannya untuk konsumsi negara-negara lain yang menjadi sahabatnya.

Proses sertifikasi dan standardisasi mutu, yang merupakan salah satu persyaratan dunia untuk penggunaan yang bermutu, menjadi bagian dari beberapa pertemuan untuk jaminan kualitas yang dikehendaki. Dengan program bersama seperti itu negara-negara Selatan-Selatan dapat memberikan dukungan tehnologi dan kualitas yang terjamin untuk sesama negara berkembang, juga dengan tawaran harga yang kompetitif.

Yang sangat menarik adalah peranan *Partners* untuk membantu menghilangkan kesenjangan antara negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Di masa lalu semua urusan untuk menghilangkan kesenjangan itu menjadi monopoli negara-negara barat atau lembaga donor.

Dengan adanya *Partners* peranan negara-negara di wilayah Asia menjadi lebih besar untuk membantu saudaranya yang ada di Afrika. Tidak



sedikit saudara kita dari negara-negara Afrika seperti dari Kenya, Nigeria, Sudan dan lainnya, berbondong-bondong datang ke Indonesia, Thailand, atau ke Bangladesh untuk bersama-sama bergumul di desa mempelajari sikap dan tingkah laku penduduk dan keluarga menghadapi ancaman ledakan penduduk, menghadapi serangan HIV/AIDS, atau masalah-masalah kemiskinan yang juga terjadi di negaranya.

Banyak pula para ahli dari Asia, seperti dari Filipina, Indonesia, Thailand, dan sebagainya, dengan sangat akrab diterima menjadi pendamping di Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, atau tempat lainnya di Afrika. Kegiatan itu menjadi perekat dari persahabatan antar bangsa.

Alangkah indahnya kalau pengalaman *Partners* antar negara selama sepuluh tahun terakhir ini menjadi pelajaran untuk membangun persahabatan dan jejaring antar kabupaten dan kota di Indonesia. Kiranya pembangunan dan pengembangan manusia yang berkualitas, mandiri, demokratis dan berbudaya dapat dikerjakan secara gotong royong.

D





**BAB
IV**

GERAKAN
KB MANDIRI